

**ANALISIS PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU 2012-2016**

**ANALYSIS OF PLANNING, SUPERVISING AND CONTROLLING ON INCOME
AND FUND BUDGET OF LOCAL GOVERNMENT (APBD) IN MARINE AND
FISHERY SERVICE RIAU PROVINCE 2012-2016**

Suharti¹, Reka Tresiana Hutahaean²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia^{1,2}

tictuc_aura@yahoo.co.id¹, rekatresiana@yahoo.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Planning, Supervising and Controlling On Income And Fund Budget of Local Government (APBD) in Marine and Fishery Service Riau Province 2012-2016). This research was conducted at the Department of Marine and Fishery Riau Province. The number of population were 60 respondents. analysis used was Multiple Linear Regression Model. The results of this study indicate that planning has no significant effect on the Income and Fund Budget of Local Government (APBD) and Supervising and Controlling have significantly influence to APBD.

Keywords: *Planning, Supervising, Controlling, Budget*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Jumlah populasi yang ditetapkan sebanyak 60 responden. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kata Kunci: Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian, Anggaran

PENDAHULUAN

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga

memiliki ospek sebagai lembaga ekonomi.

Dalam era globalisasi ini adanya perkembangan teknologi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, lelusa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan pada daerah

untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Ada begitu banyak instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Riau salah satunya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Seperti yang kita ketahui bahwa Letak Provinsi Riau sampai ke Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan regional dan internasional. Pada Provinsi Riau terdapat daerah perairan seluas 21.478,81 Km² dengan 335 desa pesisir yang terletak di sungai siak sedalam 8-12 m, sungai kampar lebih kurang 6 m, sungai indragiri 6-8 m, sungai rokan 6-8 m.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pengawasan serta pengendalian pada semua aspek pemerintah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat.

Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan didanai yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya akan diperlihatkan pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2012-2016

TAHUN	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2012	49.152.666.022	38.271.441.313	77,86
2013	58.251.208.000	49.911.193.769	85,68
2014	54.584.670.250	24.710.622.932	45,27
2015	57.143.928.847	32.462.330.872	48,03
2016	67.000.496.386	53.901.492.141	60,45

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dari tabel 1 yang terdapat diatas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja daerah sektor kelautan dan perikanan provinsi Riau pada 5 tahun terakhir mengalami keganjilan karena pada tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan akan tetapi tahun 2015 terjadi peningkatan. Disini juga dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir tidak realisasi belanja daerah yang mencapai 100% berarti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tidak melakukan pelaksanaan secara bagus sehingga tidak mencapai 100 %.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Indah Mustika Dewi (2011) dan Hermansyah (2012). Dalam penelitian ini menggunakan 2 faktor independen yaitu Perencanaan dan Pengendalian, sedangkan variabel dependen yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil dari penelitian bahwa Perencanaan dan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai pengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 2012-2016 Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Perencanaan terhadap APBD, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pengawasan terhadap APBD, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengendalian terhadap APBD.

Menurut Usman (2011) Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu terdapat unsur diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Menurut Sarwoto (2010) pengawasan adalah kegiatan yang mengusahkan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang tetapkan dan hasil yang dikehendaki.

Pengendalian manajemen pemerintahan didukung oleh struktur organisasi yang mengakomodasi sistem pengendalian, manajemen SDM, dan lingkungan pendukung. Pengendalian meliputi pengukuran layanan dan pertanggungjawaban laporan. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah yang di selenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Nordiawan (2009) menyatakan anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan yang tidak terbatas (*The process of allocating resources to unlimited demand*). Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011) pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melalui beberapa tahapan. Dimana tahapan tersebut terdiri dari tahap

persiapan, tahap lembaga legislatif, tahap administrasi, tahap pelaporan, dan terakhir pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setuju bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah sehingga dengan adanya APBD pemerintah daerah sudah memiliki anggaran yang jelas tentang apa saja yang diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

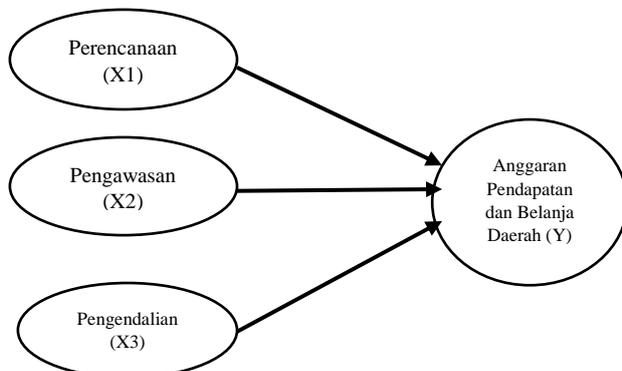
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi Otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 prinsip dasar APBD yaitu : tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan perundang-undangan, transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan akses informasi seluasnya tentang APBD, partisipatif dengan melibatkan masyarakat, Memperhatikan asas keadilan dan kepatutab, tidak bertentangan dengan kepentingan

umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan daerah terbagi atas 2 yaitu Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan, Belanja Daerah terdiri atas 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan Daerah terdiri dari 2 yaitu Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKP, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan penetapan APBD

Adanya penelitian yang menyatakan bahwa Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian memiliki pengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melihat konsistensi dari tanggapan tersebut maka dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan teori dan permasalahan yang sudah dikemukakan diatas maka kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : *Jurnal Penelitian yang dikembangkan, 2017*

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

- H1. Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- H2. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- H3. Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2010) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sedangkan sampel menurut Arikunto (2010) sampel adalah bagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 60 orang yang terdiri 30 orang pada sub bagian perencanaan dan pengendalian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, 30 orang pada sub pengawasan pada Inspektorat Provinsi Riau

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Menurut Sugiyono (2012) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen sering disebut juga sebagai *variabel output, kriteria dan konsekuensi*. Dalam penelitian ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen sering disebut juga *variabel stimulus, predictor, antecedent*. Dalam penelitian ini Perencanaan,

Pengawasan, dan Pengendalian sebagai variabel independen.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan dan hasil yang relevan, akurat dan realistis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Angket, Menurut Sugiyono (2012) angket adalah daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti. Dimana subjek nya adalah 30 orang pegawai negeri Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan APBD sedangkan 30 orang pegawai negeri Inspektorat Provinsi Riau pada bidang Pengawasan. Dokumentasi, Menurut Arikunto (2010) dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, dan sebagainya. Didalam penelitian ini data yang digunakan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 – 2016 serta sebagai pelengkap digunakan buku referensi, jurnal-jurnal ekonomi serta browsing dari internet yang terkait dengan Analisis Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka menggunakan metode statistik yaitu analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

Dimana :

Y : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi variabel perencanaan

b_2 : Koefisien regresi variabel pengawasan

b_3 : Koefisien regresi variabel pengendalian

x_1 : Perencanaan

x_2 : Pengawasan

x_3 : Pengendalian

e : Standar eror (asumsikan nol)

Analisa Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012) analisis deskriptif statistik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisa deskriptif ini digunakan untuk memberikan deskripsi tentang data variabel-variabel penelitian yang digunakan didalam penelitian. Data yang dilihat terdiri atas: Karakteristik responden terdiri dari Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Indeks Tanggapan Responden.

Uji Pendahuluan

Dalam suatu penelitian dilakukan uji pendahuluan, dimana ujian pedahuluan terdiri dari:

Uji Validitas

Menurut Ghazali (2012), uji validitas digunakan untuk mengukur sah / tidaknya suatu angket. Suatu angket dikatakan valid jika pada angket mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Hasil angket penelitian dikatakan valid apabila tingkat signifikan berada $> 0,03$ dan apabila tingkat signifikan $< 0,03$ maka data penelitian dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2012), uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket yang merupakan indikator dari variabel. Hasil angket penelitian dapat dikatakan *reliabel* jika *cronbach alpha* $> 0,06$ dan apabila *cronbach*

$\alpha < 0,06$ maka penelitian dapat dikatakan *tidak reliabel*.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut :

Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2012), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Kriteria pengujian terdiri bagi atas: Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif, Jika angka Durbin Watson (DW) antara -2 sampai +2 tidak terjadi autokorelasi, Jika angka Durbin Watson (DW) diatas 2 berarti terjadi autokorelasi negatif

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2012), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran *VIF (Variance Inflation Factor)* dan *Tolerance*. Hasil angket penelitian dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dengan ketentuan nilai *tolerance > 0,01* atau sama dengan nilai *VIF < 10* dan apabila hasil penelitian terjadi multikolinearitas dengan ketentuan nilai *tolerance < 0,01* atau sama dengan nilai *VIF > 10*.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghazali (2012), uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dengan ketentuan jika titik ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas dan apabila jika tidak ada membentuk suatu pola yang jelas / titik menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2012), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal / mendekati normal. Hasil angket dikatakan jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data dinyatakan normalitas dan apabila jika data tidak menyebar disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka data dinyatakan tidak normalitas.

Analisis Statistik

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menurut Ghazali (2012) uji statistik (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh layak secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapapun hipotesis yang dapat diambil yaitu:

H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan layak dari variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian) terhadap variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

H_1 : Ada pengaruh signifikan layak dari variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian) terhadap variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Dengan ketentuan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} yaitu : Apabila $F_{hitung} >$

F_{tabel} maka H_0 ditolak dengan tingkat nilai signifikan $< 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian) secara bersama berpengaruh signifikan layak terhadap variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)), Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dengan tingkat nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian) secara bersama tidak berpengaruh signifikan layak terhadap variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2012) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dengan ketentuan apabila R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen (Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbatas dan sebaliknya apabila R^2 besar berarti kemampuan variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian) dalam menjelaskan variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) hampir seluruhnya.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2012) uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian) yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara parsial. Tingkat signifikan ditentukan 5% dengan degree of freedom (df) = $n-k-1$ Dasar Pengambilan hipotesis sebagai berikut :

Pengaruh Perencanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Perencanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

H_1 : Terdapat pengaruh Perencanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan ketentuan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu : Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dengan tingkat nilai signifikan $< 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dengan tingkat nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengaruh Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

H_1 : Terdapat pengaruh Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan ketentuan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu : Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dengan tingkat nilai signifikan $< 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dengan tingkat nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel

pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengaruh Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

H_1 : Terdapat pengaruh Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan ketentuan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu : Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dengan tingkat nilai signifikan $< 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dengan tingkat nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pendahuluan

Sebelum dilakukan penelitian menggunakan regresi linier maka dilakukan uji pendahuluan, dimana uji pendahuluan terdiri dari :

Hasil Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan diukur.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Validitas	Keterangan
Anggaran (Y)	y1	0,575	Valid
	y2	0,505	Valid
	y3	0,491	Valid
	y4	0,375	Valid
Perencanaan (x1)	x11	0,353	Valid
	x12	0,457	Valid
	x13	0,375	Valid
	x14	0,410	Valid
Pengawasan (x2)	x21	0,357	Valid
	x22	0,599	Valid
	x23	0,584	Valid
	x24	0,515	Valid
Pengendalian (x3)	x31	0,600	Valid
	x32	0,533	Valid
	x33	0,577	Valid
	x34	0,430	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa uji validitas dari seluruh indikator nilai korelasi nya lebih dari 0,3. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perencanaan, pengendalian, pengawasan dan anggaran dapat dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Digunakan apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Anggaran (y)	0,699	Reliabel
Perencanaan (x1)	0,605	Reliabel
Pengawasan (x2)	0,715	Reliabel
Pengendalian (x3)	0,73	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari seluruh indikator mempunyai nilai koefisien alpha sebesar 0,6. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perencanaan, pengawasan, pengendalian dan anggaran dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mendukung model regresi linier berganda, maka perlu dilaksanakan pengujian terhadap asumsi-asumsi persamaan regresi meliputi :

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar kesalahan pengganggu (*error*) dalam model regresi yang digunakan sesuai dengan kriteria yang diisyaratkan dalam Durbin-Watson

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel dependen	Nilai Durbin-Watson	Keterangan
Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1,609	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson 1,609 ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi antara variabel perencanaan, pengawasan, pengendalian serta anggaran.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dimana terjadi satu atau lebih dari variabel independen berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan (x1)	0,269	3,719	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengawasan (x2)	0,266	3,76	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengendalian (X3)	0,928	1,078	Tidak Terjadi Multikolinearitas

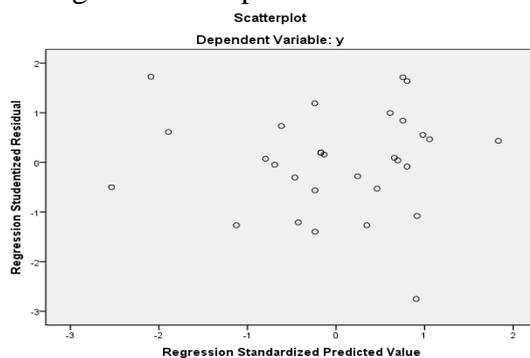
Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena

nilai *VIF* berada < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,01$ pada indikator perencanaan, pengawasan, pengendalian serta anggaran.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas yang dilihat dari grafik scatterplot.



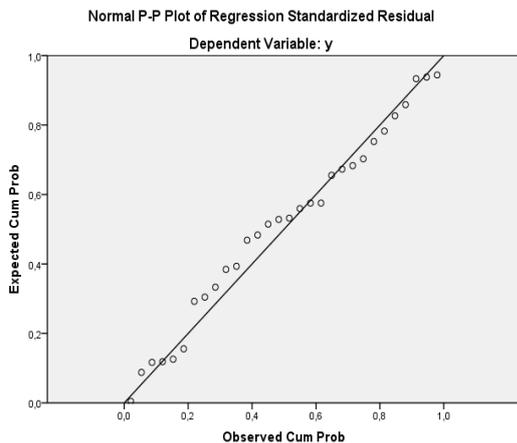
Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Gambar 2. Scatterplot Regression Predicted Value

Dari grafik scatter plot diatas dapat dilihat bahwa titik tidak membentuk suatu pola dan menyebar secara merata maka dapat dikatakan penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas antara perencanaan, pengawasan, pengendalian serta anggaran.

Hasil Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel independen (Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian) dan dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mempunyai distribusi normal atau mendekati normal yang dilihat dari grafik Normal P-P Plot of Regression Stand.



Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Gambar 3. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dari grafik p-p plot diatas dapat dilihat bahwa penyebaran titik mengikuti arah garis diagonal maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini terdistribusi secara normal.

Model Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk meramalkan pengaruh dari variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian) terhadap variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Keterangan
Constant (y)	4,153	
Perencanaan (x1)	-0,297	Berpengaruh Negatif
Pengawasan (x2)	0,401	Berpengaruh Positif
Pengendalian (x3)	0,659	Berpengaruh Positif

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel 6 tersebut didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,153 - 0,297X_1 + 0,401X_2 + 0,659X_3 + e \quad (2)$$

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan

berpengaruh negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian) mempunyai pengaruh variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Tabel 7. Hasil Uji F

Variabel	Fhitung	Ftabel	Sig	α
Perencanaan (x1), Pengawasan (x2), Pengendalian (x3)	11,819	2,769	0,000	0,05

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikan $< 0,05$ maka penelitian ini dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh secara layak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Uji Koefisien Determinasi

Sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen (Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian) terhadap variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi

Variabel	Adjusted R Square	Persentase	Error
Perencanaan (x1), Pengawasan (x2), Pengendalian (x3)	0,528	52,8	47,2

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien determinasi 0,528 yang berarti bahwa 52,8 % variabel dependen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dijelaskan oleh variabel independen (Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian), dan sisanya 47,2 dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Berikut ini hasil uji parsial :

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	sig	α
Perencanaan (x1)	-1,453		0,158	
Pengawasan (x2)	2,237	2,003	0,034	0,05
Pengendalian (x3)	5,705		0,000	

Sumber : Data Olahan SPSS, 2018

Pengujian Hipotesis Pertama (Pengaruh Perencanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Perencanaan tidak memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} -1,453 dan t_{tabel} 2,00324. Jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,453 < 2,00324$ atau sig $0,158 > 0,05$)

Hal ini berarti Perencanaan semakin menurun maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga turun. Hal ini dikarenakan dizaman sekarang banyak bagian perencanaan yang tidak membuat data rill yang

sepenuhnya dilakukan sehingga terkadang sesuatu yang dibutuhkan tetap dimasukan. Penelitian ini menentang penelitian Indah Mustika Dewi yang menyatakan bahwa Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengujian Hipotesis Kedua (Pengaruh Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Pengawasan memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} 2,237 dan t_{tabel} 2,00324. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,453 > 2,00324$ atau sig $0,034 < 0,05$)

Hal ini berarti Pengawasan semakin meningkat maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga meningkat. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Irna Setiyanningrum (2017) yang menyatakan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengujian Hipotesis Ketiga (Pengaruh Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Pengendalian memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal ini dikarenakan nilai t_{hitung} 5,705 dan t_{tabel} 2,00324. Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,705 > 2,00324$ atau sig $0,000 < 0,05$)

Hal ini berarti Pengendalian semakin meningkat maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga akan semakin meningkat. Hal ini

mendukung penelitian yang dilakukan Hermasnyah (2012) yang menyatakan bahwa Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa (1) Perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (3) Pengendalian memiliki pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (4) Secara bersamaan Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian memiliki pengaruh yang layak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saran

Pada subbag perencanaan memeriksa setiap anggaran yang akan diberikan pada setiap bagian. Pada subbag pengendalian memperhatikan setiap pengeluaran yang akan dipakai atau dikeluarkan. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel lain yang lebih bervariasi misal nya Pelaksanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 20*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hermansyah. (2012). Pengaruh Perencanaan dan Pengendalian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia, Pekanbaru.
- Indah Mustika Dewi. (2011). Pengaruh Perencanaan dan Pengendalian Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang, Kabupaten Malang
- Irna, Settiyanningrum. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Daerah Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. (2009). *Akuntansi Pemerintah Edisi Kesatu*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Tentang Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2015 Tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Sarwoto. (2010). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini. (2011). *Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.